

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Ketimpangan Pendapatan

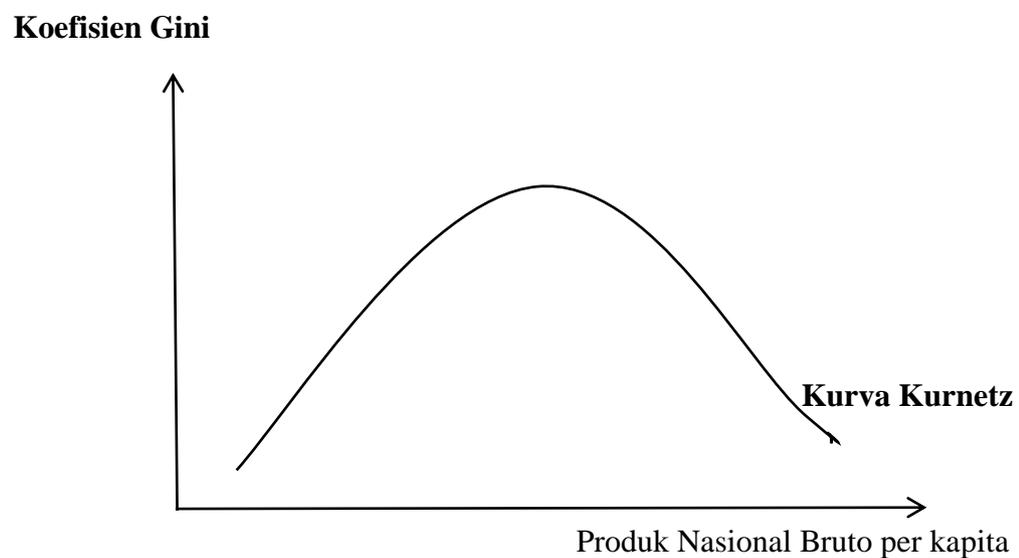
Menurut Kuncoro (2006), ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (endowment factor). Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010).

Menurut Syafrizal (2008), ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga tiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam proses pembangunan. Perbedaan wilayah ini yang menimbulkan adanya wilayah maju dan wilayah terbelakang. Menurut hipotesa Neo-Klasik, dalam proses pembangunan awalnya ketimpangan akan meningkat, proses ini akan terjadi hingga ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah mencapai titik puncak dan proses pembangunan masih terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan tersebut akan menurun (Syafrizal, 2008).

Kurnetz (1995) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap

selanjutnya distribusi pendapatan akan meningkat. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kurnetz “U-Terbalik”, karena perubahan longitudina (*time series*) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kurnetz dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perubahan sektor modern.

Gambar 2.1
Kurva Kurnetz “U-Terbalik”



Menurut Todaro (2003), pemerataan yang lebih yang adil di negara berkembang merupakan suatu kondisi atau syarat menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin timpang distribusi pendapatan disuatu negara akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan antar daerah tergantung dari besarnya jumlah pendapatan yang

diterima oleh setiap penerimaan pendapatan dalam daerah tersebut, baik itu golongan masyarakat maupun wilayah tertentu daerah tersebut.

Keadaan ini dijelaskan Todaro (1995), bahwa negara-negara maju secara keseluruhan memperlihatkan pembagian pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan negara-negara dunia ketiga yakni negara-negara yang tergolong sedang berkembang.

Menurut Syafrizal (2012: 119), ketimpangan ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Perbedaan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada suatu daerah. Daerah yang memiliki kandungan SDA lebih banyak akan dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya yang relatif lebih rendah. Kondisi tersebut akan berdampak pada PDRB per kapita yang berbeda antar daerah. PDRB per kapita daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih banyak akan tinggi dan begitupun sebaliknya.

b. Perbedaan Kondisi Demografis

Kondisi demografis yang dimaksud meliputi perbedaan pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan tingkah laku kebiasaan serta etos kerja masyarakat suatu daerah. Kondisi demografis yang berbeda dapat mendorong ketimpangan antar daerah karena hal tersebut berkaitan dengan produktivitas kerja masyarakat daerah tersebut. Daerah yang memiliki daerah demografis yang baik akan

cenderung diikuti dengan produktivitas kerja yang lebih tinggi, sehingga akan mendorong peningkatan investasi. Selanjutnya hal ini akan berdampak pada peningkatan penyediaan lapangan kerja dan PDRB per kapita daerah tersebut.

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang direncanakan pemerintah atau migrasi spontan. Jika mobilitas barang kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak bisa dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Hal ini juga berlaku pada migrasi, migrasi yang kurang lancar akan berdampak pada kelebihan tenaga kerja di suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa tersebut menyebabkan ketimpangan karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, akibatnya daerah terbelakang akan kesulitan dalam mendorong kegiatan perekonomiannya. Negara berkembang cenderung memiliki ketimpangan yang tinggi karena kurangnya mobilitas barang dan jasa akibat fasilitas transportasi dan komunikasi yang masih terbatas.

d. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi disebabkan oleh tiga faktor, yaitu, perbedaan sumber daya alam, fasilitas transportasi (darat, laut, dan udara) dan kondisi demografis. Daerah yang memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi lebih tinggi akan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi

yang lebih cepat. Sehingga mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

e. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Daerah yang mendapatkan alokasi lebih besar dari pemerintah akan menarik lebih banyak investor swasta ke daerah tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat. Kondisi tersebut juga akan menyebabkan tersedianya lapangan kerja yang lebih banyak dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi.

Alokasi investasi pemerintah ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Indonesia menganut sistem otonomi atau desentralisasi, sehingga dana investasi pemerintah lebih banyak dialokasikan ke daerah, dengan begitu ketimpangan ekonomi antar wilayah akan lebih rendah. Sistem otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Pemerintah daerah memiliki kewenangan masing-masing. Selain itu, setiap daerah juga diberi tambahan alokasi dana dalam bentuk *Block Grant* berupa dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Khusus.

Ketimpangan antar wilayah dalam kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam proses pembangunan suatu daerah. Dengan adanya ketimpangan, maka akan mendorong daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas pembangunannya agar tidak tertinggal dengan daerah yang sudah

maju. Selain dampak positif dari adanya ketimpangan dalam pembangunan, adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah maka akan semakin terjadi inefisiensi ekonomi, sehingga melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dianggap tidaklah adil (Todaro, 2004).

Tingkat ketimpangan antar wilayah dapat diketahui dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (regional inequality) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson (Syafrizal, 2008)

$$IW = \sum \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana :

- Y_i = PDRB per kapita daerah i
- Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah
- F_i = Jumlah penduduk daerah i
- N = Jumlah penduduk seluruh daerah

2. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Definisi mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih belum seragam antar satu institusi dengan institusi yang lain. Berikut ini dijelaskan definisi UMKM dari masing - masing institusi.

1. Badan Pusat Statistika

Badan Pusat Statistika mendefinisikan UMKM berdasarkan ukuran ketenagakerjaan. Usaha mikro adalah yang mempekerjakan lima orang

termasuk pekerja keluarga yang tidak dibayar. Usaha kecil apabila mempekerjakan 5 sampai 10 orang, dan usaha menengah apabila mempekerjakan 20 sampai 99 orang.

2. Bank Indonesia

Bank Indonesia mendefinisikan UMKM dengan dua kriteria. Kriteria yang pertama berdasarkan aset, omset, dan badan hukum. Yang disebut usaha mikro adalah usaha yang dilakukan orang miskin atau hampir miskin, milik keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah dimasuki dan keluar. Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset hingga Rp 200 juta di luar tanah bangunan dengan omset Rp 1 miliar. Lalu disebut usaha menengah apabila beromset Rp 3 miliar, yang terbagi dalam dua jenis, yaitu industri bukan manufaktur dengan aset hingga Rp 600 juta diluar tanah dan bangunan serta industri manufaktur dengan aset hingga Rp 5 miliar.

Kriteria yang kedua berdasarkan kredit yang diterima oleh pengusaha. Usaha mikro adalah usaha yang dapat menerima kredit hingga Rp 50 juta. Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang dapat menerima kredit mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Lalu usaha menengah adalah usaha yang dapat menerima kredit dari Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar.

3. Bank Dunia

Menurut Bank Dunia, usaha mikro adalah kegiatan usaha yang menggunakan pekerja hingga 20 orang. Sedangkan usaha kecil dan

menengah (UKM) adalah perusahaan yang menggunakan tenaga kerja diatas 20 orang dengan aset di luartanah dan bangunan hingga US\$ 500 ribu.

4. Undang - Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Definisi UMKM yang terdapat di dalam Undang - undang Nomer 20 Tahun 2008 merupakan definisi UMKM yang terbaru di Indonesia, menggantikan definisi UMKM yang lama, yaitu Undang - undang Nomer 9 Tahun 1995. definisi usaha mikro, kecil dan menengah dijelaskan satu persatu berikut ini.

Usaha mikro adalah produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling bayak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300 juta.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berarti sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha: atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha: usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

5. Kementrian Koperasi dan UKM

Mengelompokkan UKM menjadi tiga kelompok berdasarkan total aset, total penjualan tahunan dan status usaha dengan kriteria:

1. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum beradab hukum. Hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta.
2. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria :

- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah
 - c. Usaha yang berdiri sendiri bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang di miliki, di kuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan skala besar.
 - d. Bentuk badan usaha yang dimiliki perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan huku, koperasi
3. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria :
- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 200 juta rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan usaha
 - b. Usaha yang berdiri sendiri bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang di miliki, di kuasi dan terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau sekala besar.
 - c. Berbentuk usaha yang di dimiliki perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum termasuk koperasi.

Berdasarkan UU no.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro,kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Menurut Anderson (dalam Sulistyastuti, 2004) dalam industri suatu negara kontribusi industri kecil dan rumah tangga sangat penting dalam proses industrialisasi dalam tahap awal yaitu sebesar 50% hingga 75% . Menurut Adha Panca Wardanu (2009) peran usaha mikro dan kecil dapat dilihat melalui 2 aspek, yaitu peran terhadap penyerapan tenaga kerja yang besar karena sektor UMK didominasi padat karya atau *home industri* dan peranan terhadap nilai ekspor. Selain itu, UMK begitu penting peranannya khususnya di Indonesia dimana jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah sumber daya alam yang berlimpah, capital terbatas, pembangunan desa masih terbelakang dan distribusi pendapatan tidak merata, sangat erat hubungannya dengan sifat umum usaha mikro, kecil dan menengah.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dalam kelompok sama. Tingkat partisipasi dapat dinyatakan untuk seluruh penduduk dalam usia kerja dan dapat dinyatakan untuk satu kelompok penduduk tertentu seperti kelompok laki-laki, kelompok tenaga terdidik, kelompok 10-14 tahun

di desa (Simanjuntak, 2001:45). Pengukuran TPAK dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

Jika TPAK 75% diartikan bahwa angkatan kerja 75 orang, yakni mereka yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan, dari setiap 100 orang tenaga kerja. Berdasarkan TPAK maka dapat diperkirakan berapa besar penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

Menurut Payaman (2005:47) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi TPAK adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk yang masih bersekolah, bahwa semakin besar jumlah penduduk maka semakin kecil jumlah angkatan kerja dan TPAK juga akan semakin kecil.
2. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga, bahwa semakin banyak anggota pada setiap keluarga yang mengurus rumah tangga maka semakin kecil TPAKnya.
3. Umur, penduduk yang berusia muda pada umumnya tidak begitu besar tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah untuk keluarga karena sebagian besar masih duduk dalam bangku sekolah. Penduduk dalam kelompok umur 25-55 tahun terutama laki-laki dituntut untuk lebih banyak ikut dalam mencari nafkah, sehingga TPAK relatif besar. Lebih lagi penduduk dalam kelompok umur di atas 55 tahun sudah mulai menurun kemampuannya untuk bekerja, ini mengakibatkan TPAK yang rendah.

4. Tingkat upah, jika tingkat upah dimasyarakat semakin tinggi, maka semakin banyak yang tertarik untuk masuk ke pasar kerja. Kenaikan upah mempengaruhi penyediaan tenaga kerja, di satu pihak tingkat upah meningkatkan pendapatan (*income effect*) yang cenderung akan mengurangi TPAK dan di lain pihak meningkatnya upah akan membuat nilai waktu menjadi relatif mahal dan pekerjaan menjadi lebih menarik untuk menggantikan waktu senggang (*substitution effect*).
5. Tingkat pendidikan, pendidikan mempengaruhi TPAK melalui dua jalur. Pertama yaitu bahwa banyak penduduk yang bersekolah akan membuat TPAK menurun. Kedua, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, nilai waktunya semakin mahal, sehingga waktu senggangnya akan digunakan untuk bekerja (*substitution effect*). dan juga kebanyakan wanita yang mempunyai pendidikan tinggi cenderung untuk memilih bekerja daripada tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga, hal ini menyebabkan TPAK mengalami kenaikan.
6. Kegiatan ekonomi, seperti program pembangunan, disatu pihak menuntut keterlibatan banyak orang dan dilain pihak dapat menumbuhkan harapan-harapan yang baru. Harapan untuk menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan dalam peningkatan partisipasi kerja. Jadi, semakin banyak kegiatan ekonomi maka TPAK juga semakin meningkat. Contohnya,

adanya pembangunan pelabuhan baru maka akan banyak melibatkan pekerja, dan juga membutuhkan haapan baru untuk melakukan atau menawarkan jasanya pada hasil pembangunan tersebut, misalnya sebagai nelayan, atau menjadi pekerja pabrik pengalengan ikan.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan produk nasional (GNP,GDP) karena ada peningkatan kualitas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu (Hudiyanto, 2001). pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun (Simanjuntak, 1985:9). sehingga untuk menilai pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan besarnya nilai GNP/GDP dari berbagai tahun.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi menurut Kurnetz dalam (Todaro, 2000) yakni kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang yang tumbuh atas kemajuan teknologu, kelembagaan, dan idiologis. Dalam definisi tersebut terdapat tiga komponen penting yakni :

1. Pertumbuhan ekonomi suatu negara terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang. Kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang adalah tanda kematangan ekonomi suatu negara.

2. Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat kemampuan pertumbuhan dalam menyediakan berbagai macam barang.
3. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat.

4.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor-faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaanya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengambilan modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini akan mendapatkan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi

terwujud. Keadaann seperti itu tidak akan terus menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahanya akan akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat akan menurun kembali (Sukirno, 2006).

4.2 Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari Keynes yang tidak menyinggung masalah ekonomi dalam jangka panjang. Anaisis Harrod-Domar tetap menambahkan aspek pembentukan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar mengembangkan suatu koefisien yang diturunkan dari suatu rumus tentang pertumbuhan ekonomi. Koefisien tersebut menghubungkan antara pertumbuhan modal dengan pertumbuhan ekonomi (Raharjo, 2013: 62-63).

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y}$$

Sejalan denga pengertian diatas dapat diilustrasikan sebagai berikut : misalkan diketahui bahwa koefisien ICOR di suatu daerah sebesar 4. artinya untuk meningkatkan output satu unit diperlukan investasi sebesar 4 unit. Jika dietahui juga output di daerah tersebut pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 8 miliar maa agar output pada tahun yang akan datang tumbuh 10 prsenatau bertambah sebesar Rp. 0,2 miliar, dibutuhkan investasi sebesar Rp. 0,8 miliar.

Pada kenyataanya pertambahan output bukan hanya disebabkan oleh investasi, teteapi juga oleh faktor-faktor lain diluar investasi seperti

pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi, dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor lain selain investasi diasumsikan konstan.

Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi (Tarigan, 2005): *pertama*, perekonomian bersifat tertutup dimana hanya terdapat dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. *Kedua*, kecenderungan masyarakat untuk menabung (MPS) besarnya konstan, demikian juga dengan rasio antara modal-output. *Ketiga*, tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Berdasarkan asumsi tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhinya syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut (Tarigan, 2005).

$$g = k = n$$

Dimana :

g = growth (tingkat pertumbuhan output)

k = capital (tingkat pertumbuhan modal)

n = tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Pertumbuhan yang mantap terjadi apabila terdapat ketertarikan antara tabungan (S) dan investasi (I) yang saling menyeimbangkan. Namun, peran k untuk menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh v (*capital ratio output*). Hal ini ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Misal,

perekonomian berada dalam kapasitas penuh dengan total pendapatan (Y) = 2.000 triliun rupiah. Hasrat menabung (S) sebesar 2%, karena $I = S$ maka tingkat investasi adalah $20\% \times 2.000$ triliun rupiah = 4.000 triliun rupiah. Misalkan rasio modal output adalah 5 : 1 (diperlukan modal Rp. 5,00 agar terdapat kenaikan produksi sebesar Rp. 1,00 per tahun) atau produktivitas modal sebesar 0,40. Besarnya kenaikan output adalah $I/v = 400/5 = 80$ triliun rupiah. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi adalah $g = 80$ triliun rupiah/2.000 triliun rupiah = 4% dengan ketentuan laju pertumbuhan tenaga kerja sebesar 4%.

Pertumbuhan yang mantap tergantung pada apakah arus modal dan tenaga kerja inter regional bersifat menyeimbangkan atau tidak (Tarigan, 2005: 51). Pada model ini arus modal dan tenaga kerja searah karena pertumbuhan membutuhkan keduanya secara seimbang. Namun dalam praktiknya daerah yang pertumbuhannya tinggi (daerah yang telah maju) akan menarik modal dan tenaga kerja dari daerah lain yang pertumbuhannya rendah dan hal ini membuat pertumbuhan antar daerah menjadi timpang. Artinya daerah maju akan semakin maju dan yang terbelakang akan semakin tertinggal. Dengan demikian pertumbuhan antar daerah akan mengarah kepada heterogenous (*makin timpang*) (Tarigan, 2005).

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang dipilih dan direkomendasikan untuk mengkaji perbandingan pencapaian pembangunan manusia antarwilayah maupun perkembangan antarwaktu. Indeks ini mulai diperkenalkan secara resmi oleh UNDP pada tahun 1990 dan sejak tahun 1996 mulai dihitung pada level provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia (BPS Yogyakarta). IPM provinsi dan kabupaten/kota secara berkala dirilis setiap tahun dan digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan manusia daerah di Indonesia. IPM disusun dari empat indikator yang menggambarkan tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Dimensi peluang hidup diukur menggunakan indikator angka harapan hidup penduduk pada saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan dua indikator, yakni angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia kerja.

Indeks Pembangunan Manusia (Todaro dan Smith, 2004) mencoba untuk memperringkat semua negara atau daerah dari skala 0 (IPM terendah) hingga 1 (IPM tertinggi) berdasarkan tiga tujuan atau produk akhir IPM:

1. Masa hidup yang diukur menggunakan usia harapan hidup
2. Pengetahuan yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara terimbang (dua pertiga) dan rata-rata sekolah (satu pertiga)
3. Standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan riil perkapita, disesuaikan dengan disparitas daya beli mata uang setiap negara

untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas yang semakin menurun dari pendapatan.

Adapun metode perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dengan ketiga komponen tersebut merupakan rata-rata sederhana, yakni sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

$$X_2 = 1/3 X_{12} + 2/3 X_{22}$$

Keterangan :

X_1 = Lamanya hidup (tahun)

X_2 = Tingkat pendidikan; $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah)

X_3 = Pendapatan riil per kapita (Rp)

X_{12} = Rata-rata lama bersekolah (tahun)

X_{22} = Angka melek huruf (persen)

Menurut Todaro dan Smith (2004), salah satu keuntungan terbesar IPM yaitu indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar dapat berperan relatif lebih kecil dalam pembangunan manusia.

IPM menunjukkan dengan jelas bahwa kesenjangan dalam pendapatan lebih besar daripada kesenjangan dalam indikator pembangunan yang lain,

paling tidak dalam indikator kesehatan dan pendidikan. IPM juga mengingatkan kita bahwa pembangunan, yang kita maksudkan adalah pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Kesehatan dan pendidikan bukan hanya input fungsi produksi namun juga merupakan tujuan pembangunan yang fundamental (Todaro dan Smith, 2004).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Topik penelitian yaitu tentang ketimpangan pendapatan. Dimana ketimpangan pendapatan adalah masalah ekonomi yang menarik untuk dibahas.

No.	Judul dan Penulis	Metode	Hasil
1	Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2013. Riskha Dwi Astuti (2015)	Variabel Dependen : Gini Rasio Variabel Independen : IPM, PDRB perkapita, populasi penduduk Metode <i>Fixed</i>	1. IPM memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 2. PDRB perkapita berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 3. Populasi penduduk

		<i>Effect Model</i>	berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
2.	Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Muhammad Arif dan Rossy Agustin Wicaksani (2017)	Variabel dependen : Indeks Gini Variabel independen : IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk	1. IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan 2. Pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan
3.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2008-2012 Susi Lestari (2015)	Variabel dependen : Indeks Williamson Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Jumlah Penduduk,	Variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
4.	Analisis Faktor- faktor Yang Mempengaruhi	Variabel Dependen : Indeks	1. Variabel UMP berpengaruh negatif

	<p>Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2014-2016</p> <p>Aldi Abdullah Arif (2018)</p>	<p>Gini Variabel dependen :</p> <p>Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, UMP</p>	<p>terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar Pulau di Sumatera</p> <p>2. Variabel PDRB dan kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar Pulau di Sumatera</p> <p>3. Variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh</p>
5.	<p>Analisis Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Jawa</p> <p>Ellza Alfya Rahma (2018)</p>	<p>Variabel dependen : Indeks Gini Variabel Independen :PDRB, IPM, TPAK, TPT</p> <p>Metode <i>Fixed Effect Model</i></p>	<p>1. Variabel PDRB perkapita, IPM, TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan</p> <p>2. Variabel TPAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan</p>

6.	<p>Determinan of income Inequality : Sub Saharan Perspective (Simon Fulgsang, 2013)</p>	<p>Indeks gini, Inflasi, Pertumbuhan penduduk perkotaan, hiperinflasi, investasi, industrialisasi, pertumbuhan populasi Regresi data panel (<i>Random Effect</i>)</p>	<p>Inflasi, pertumbuhan penduduk perkotaan berpengaruh negatif. Sedangkan industrialisasi, hiperinflasi, investasi, dan peryumbuhan populasi berpengaruh positif.</p>
7.	<p>Economic and Political Determinants of Income Inequality (Zlato Nikoloski)</p>	<p>$IGini = IGini (t-1) + Democracy + Oil and gas Production + \text{LogGDP per capita} + \text{Log of GDP per capita squared} + \text{Industry Value Added} + \text{GDP growth} + \text{Credit to Privat Sector} + \text{trade openness} +$</p>	<p>Semua variabel signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan kecuali variable demokrasi. Sedangkan untuk GDP per kapita berpengaruh positif pada jangka pendek dan negatif pada jangka panjang.</p>

		Government expenditure + Size of the country + error term Regresi GMM	
8.	The Analysis of Regional Earnings Inequalities in Romania (Amalia Cristescu, Larisa Stanila, Maria Denisa Vasilescu)	Variabel Dependen: Indeks Gini Variabel independen : investasi asing, PDB, tingkat inflasi, Regresi data panel (Stata)	Semua variabel memiliki pengaruh yang positif, kecuali PDB berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan,
9.	Income Inequality in the Philippines 1961-91 (Jonna P. Estudillo)	(Kualitatif deskriptif) Analisis FIES	Proporsi penduduk perkotaan, perubahan distribusi umur, pendidikan kepala keluarga dan tingkat upah berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

C. Hipotesis

Dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga terdapat pengaruh negatif antara jumlah UMKM dengan ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, bahwa semakin meningkat jumlah UMKM suatu wilayah maka ketimpangan pendapatan akan semakin berkurang.
2. Diduga terdapat pengaruh yang negatif antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, bahwa semakin meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) maka ketimpangan pendapatan akan semakin tinggi.
3. Diduga terdapat pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan berpengaruh pada tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta.
4. Diduga terdapat pengaruh negatif antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, bahwa semakin tinggi IPM maka akan berpengaruh pada tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta.

D. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini digambarkan suatu kerangka pemikiran yang skematis sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Teoritis

